

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis data yang dilakukan dalam tesis ini adalah analisis Statistik deskriptif, analisis inferensial dengan menggunakan model regresi linier berganda dan analisis rasio untuk menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak.

A Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Berikut akan dipaparkan analisis deskriptif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak, yaitu:

1. Analisis deskriptif Hasil Pemeriksaan Pajak
2. Analisis deskriptif Nilai Surat Setoran Pajak (SSP)
3. Analisis deskriptif Nilai Pemindahbukuan (Pbk)
4. Analisis deskriptif Hasil SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding
5. Analisis deskriptif Penghapusan Piutang Pajak
6. Analisis deskriptif Wajib Pajak Pindah
7. Analisis deskriptif Juru Sita Pajak
8. Analisis deskriptif Nilai Surat Tegoran (ST)
9. Analisis deskriptif Nilai Surat Paksa (SP)
10. Analisis deskriptif Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

A.1 Analisis Deskriptif Hasil Pemeriksaan Pajak

Hasil pemeriksaan pajak adalah produk hukum berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pemeriksa pajak berupa ketetapan pajak yang kurang dibayar oleh Wajib Pajak atau produk hukum berdasarkan hasil penelitian Surat Pemberitahuan (SPT) oleh petugas pajak. Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa pada tahun 2005 KPP Jakarta Cengkareng memiliki hasil pemeriksaan

pajak terendah dengan nilai ketetapan pajak sebesar Rp 33,634 milyar sedangkan hasil pemeriksaan pajak tertinggi adalah KPP Jakarta Tamansari Satu dengan nilai ketetapan pajak sebesar Rp 175,914 milyar. Pada tahun 2006 KPP Jakarta Tambora memiliki hasil pemeriksaan pajak terendah dengan nilai ketetapan pajak sebesar Rp 26,389 milyar sedangkan hasil pemeriksaan pajak tertinggi adalah KPP Kebon Jeruk dengan nilai ketetapan pajak sebesar Rp 89,093 milyar. Pada tahun 2007 KPP Jakarta Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu memiliki hasil pemeriksaan pajak terendah dengan nilai ketetapan pajak sebesar Rp 4,162 milyar sedangkan hasil pemeriksaan pajak tertinggi adalah KPP Pratama Jakarta Kembangan dengan nilai ketetapan pajak sebesar Rp 72,087 milyar.

Tabel 4.1. Hasil Pemeriksaan Pajak (dalam ribuan rupiah)

No.	KPP Jakarta	Tahun Pajak			Total
		2005	2006	2007	
1.	Palmerah	36.443.865	45.033.381	18.632.487	100.109.733
2.	Grogol Petamburan	45.164.733	35.019.139	20.441.137	100.625.009
3.	Tamansari Satu	175.914.664	51.937.708	16.767.786	244.620.158
4.	Tamansari Dua	36.154.831	31.699.090	4.835.597	82.689.518
5.	Tambora	54.851.523	26.389.315	14.767.077	96.007.915
6.	Cengkareng	33.634.364	51.837.628	27.809.001	113.280.993
7.	Kebon Jeruk	101.019.425	89.093.162	84.526.822	274.639.409
8.	Kalideres ***)	-	-	32.017.006	32.017.006
9.	Kebon Jeruk Satu**)	-	-	4.162.888	4.162.888
10.	Kebon Jeruk Dua**)	-	-	45.380.352	45.380.352
11.	Kembangan**)	-	-	72.087.765	72.087.765
12.	Madya Jakarta Barat*)	-	-	29.459.321	29.459.321
	Total	483.183.405	331.009.423	380.887.239	

*)Terbentuk pada tanggal 26 Januari 2007 dengan mengambil Wajib Pajak Besar dari tiap-tiap KPP
 **)KPP Jakarta Kebon Jeruk dipecah menjadi KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu, KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua dan KPP Pratama Jakarta Kembangan pada tanggal 26 Juni 2007
 ***) KPP Jakarta Cengkareng dipecah menjadi KPP Pratama Jakarta Cengkareng dan KPP Pratama Jakarta Kalideres pada tanggal 26 Juni 2007

Sumber dari laporan bulanan KPL.KW.753 yang dibuat per tahun

A.2 Analisis Deskriptif Nilai Surat Setoran Pajak (SSP)

SSP adalah pembayaran yang dilakukan oleh Wajib pajak untuk pajak terutang atas ketetapan pajak atau oleh hasil pelepasan barang Wajib pajak untuk membayar utang pajaknya. Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa pada tahun 2005 KPP Jakarta Tambora memiliki nilai SSP terendah dengan nilai

sebesar Rp 11,230 milyar sedangkan nilai SSP tertinggi adalah KPP Jakarta Kebon Jeruk dengan nilai sebesar Rp 26,665 milyar. Pada tahun 2006 KPP Jakarta Tambora memiliki nilai SSP terendah dengan nilai sebesar Rp 9,457 milyar sedangkan nilai SSP tertinggi adalah KPP Kebon Palmerah sebesar Rp 33,436 milyar. Pada tahun 2007 KPP Jakarta Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua memiliki nilai SSP terendah dengan nilai ketetapan pajak sebesar Rp 199 juta sedangkan nilai SSP tertinggi adalah KPP Madya Jakarta Barat dengan nilai SSP sebesar Rp 42,052 milyar.

Tabel 4.2. Nilai Surat Setoran Pajak (dalam ribuan rupiah)

No.	KPP Jakarta	Tahun Pajak			
		2005	2006	2007	Total
1.	Palmerah	19.452.313	24.659.049	17.794.479	61.905.841
2.	Grogol Petamburan	20.544.092	14.307.482	13.957.681	48.809.256
3.	Tamansari Satu	22.595.496	16.251.238	15.364.503	54.211.237
4.	Tamansari Dua	22.395.454	21.982.471	10.059.999	54.437.924
5.	Tambora	11.230.291	9.457.524	9.612.185	30.300.000
6.	Cengkareng	21.502.964	18.872.217	5.263.243	45.638.424
7.	Kebon Jeruk	26.665.525	33.436.045	33.051.293	93.152.863
8.	Kalideres	-	-	526.334	526.334
9.	Kebon Jeruk Satu	-	-	938.884	938.884
10.	Kebon Jeruk Dua	-	-	1.390.956	1.390.956
11.	Kembangan	-	-	199.350	199.350
12.	Madya Jakarta Barat	-	-	42.052.070	42.052.070
	Total	144.386.135	138.966.026	150.210.977	

Sumber dari laporan bulanan KPL.KW.753 yang dibuat per tahun

A.3 Analisis Deskriptif Nilai Pemindahbukuan (Pbk)

Nilai Pemindahbukuan adalah pembayaran utang pajak oleh Wajib pajak atas ketetapan pajak yang harus dibayar Wajib Pajak yang secara administratif dikurangkan atas ketetapan pajak lebih bayarnya. Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa pada tahun 2005 KPP Jakarta Tamansari Dua memiliki nilai Pbk terendah dengan nilai sebesar Rp 370 juta sedangkan nilai Pbk tertinggi adalah KPP Jakarta Kebon Jeruk dengan nilai Pbk sebesar Rp 6,873 milyar. Pada tahun 2006 KPP Jakarta Tamansari Dua memiliki nilai Pbk terendah dengan nilai Pbk sebesar Rp 2,348 milyar sedangkan nilai Pbk tertinggi adalah KPP Jakarta Tamansari Satu dengan nilai Pbk sebesar Rp 11,307 milyar. Pada tahun 2007 KPP Pratama Jakarta Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua memiliki

nilai Pbk terendah dengan nilai Pbk sebesar nol rupiah sedangkan nilai Pbk tertinggi adalah KPP Madya Jakarta Barat dengan nilai Pbk sebesar Rp 44,056 milyar.

Tabel 4.3 Nilai Pemindahbukuan (dalam ribuan rupiah)

No.	KPP Jakarta	Tahun Pajak			
		2005	2006	2007	Total
1.	Palmerah	6.343.287	5.298.287	2.174.971	13.816.545
2.	Grogol Petamburan	4.654.028	6.027.041	3.562.733	14.243.803
3.	Tamansari Satu	3.303.400	10.823.949	500.212	14.627.561
4.	Tamansari Dua	370.265	2.348.116	1.210.744	3.929.125
5.	Tambora	5.633.770	10.753.366	4.153.377	20.540.513
6.	Cengkareng	5.203.434	11.307.441	5.026.504	21.537.379
7.	Kebon Jeruk	6.873.739	4.441.991	8.902.817	20.218.547
8.	Kalideres	-	-	122.252	122.252
9.	Kebon Jeruk Satu	-	-	40.850	40.850
10.	Kebon Jeruk Dua	-	-	0	0
11.	Kembangan	-	-	270.307	270.307
12.	Madya Jakarta Barat	-	-	44.056.286	44.056.286
	Total	32.381.923	51.000.191	70.021.053	

Sumber dari laporan bulanan KPL.KW.753 yang dibuat per tahun

A.4 Analisis Deskriptif Hasil Surat Keputusan Pembetulan/ Surat Keputusan Keberatan/ Putusan Banding

Surat Keputusan Pembetulan/ Surat Keputusan Keberatan/ Putusan Banding adalah surat keputusan yang berkekuatan hukum yang dapat mengurangi atau menambah ketetapan pajak Wajib pajak. Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa pada tahun 2005 KPP Jakarta Palmerah memiliki hasil SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding terendah dengan nilai keputusan sebesar Rp 15,557 milyar sedangkan hasil SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding tertinggi adalah KPP Jakarta Tambora dengan nilai keputusan sebesar Rp 53,516 milyar. Pada tahun 2006 KPP Jakarta Tambora memiliki hasil SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding terendah dengan nilai keputusan sebesar Rp 8,293 milyar sedangkan hasil SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding tertinggi adalah KPP Jakarta Tamansari Satu dengan nilai keputusan sebesar Rp 190,132 milyar. Pada tahun 2007 KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua memiliki hasil SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding terendah dengan nilai keputusan sebesar nol rupiah

sedangkan hasil SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding tertinggi adalah KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua dengan nilai keputusan sebesar Rp 7,568 milyar.

Tabel 4.4 Hasil SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding (dalam ribuan rupiah)

No.	KPP Jakarta	Tahun Pajak			
		2005	2006	2007	Total
1.	Palmerah	15.557.834	17.757.354	892.560	34.207.748
2.	Grogol Petamburan	25.838.803	12.137.305	6.541.212	44.517.320
3.	Tamansari Satu	27.799.679	190.132.915	3.514.013	221.446.607
4.	Tamansari Dua	16.718.006	9.816.781	7.568.918	34.103.705
5.	Tambora	53.516.149	8.293.663	1.631.787	63.441.599
6.	Cengkareng	19.030.000	11.084.141	1.851.409	31.965.550
7.	Kebon Jeruk	34.090.157	13.871.347	12.708.059	60.669.563
8.	Kalideres	-	-	1.990.930	1.990.930
9.	Kebon Jeruk Satu	-	-	589.959	589.959
10.	Kebon Jeruk Dua	-	-	0	0
11.	Kembangan	-	-	589.959	0
12.	Madya Jakarta Barat	-	-	5.822.256	5.822.256
	Total	192.550.628	263.093.506	43.701.061	

Sumber dari laporan bulanan KPL.KW.753 yang dibuat per tahun

A.5 Analisis Deskriptif Penghapusan Piutang Pajak

Penghapusan Piutang Pajak adalah pengurangan utang pajaknya Wajib Pajak yang dianggap nyata-nyata tidak dapat ditagih. Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa pada tahun 2005 terdapat satu KPP yang melakukan penghapusan piutang pajak, yaitu KPP Jakarta Cengkareng. KPP Jakarta Cengkareng melakukan penghapusan piutang pajak dengan nilai sebesar Rp 2,703 milyar. Pada tahun 2006 terdapat dua KPP yang melakukan penghapusan piutang pajak, yaitu KPP Jakarta Cengkareng dan KPP Jakarta Palmerah. KPP Jakarta Cengkareng melakukan penghapusan piutang pajak sebesar Rp 106,772 juta sedangkan KPP Jakarta Palmerah melakukan penghapusan piutang pajak sebesar Rp 278, 116 Juta. Pada tahun 2007 tidak terdapat KPP yang melakukan penghapusan piutang pajak.

Tabel 4.5 Penghapusan Piutang Pajak (dalam ribuan rupiah)

No.	KPP Jakarta	Tahun Pajak			
		2005	2006	2007	Total
1.	Palmerah	0	278.116	0	278.116
2.	Grogol Petamburan	0	0	0	0
3.	Tamansari Satu	0	0	0	0
4.	Tamansari Dua	0	0	0	0
5.	Tambora	0	0	0	0
6.	Cengkareng	2.703.961	106.772	0	2.810.733
7.	Kebon Jeruk	0	0	-	0
8.	Kalideres	-	-	0	0
9.	Kebon Jeruk Satu	-	-	0	0
10.	Kebon Jeruk Dua	-	-	0	0
11.	Kembangan	-	-	0	0
12.	Madya Jakarta Barat	-	-	0	0
	Total	2.703.961	384.888	0	

Sumber dari laporan bulanan KPL.KW.753 yang dibuat per tahun

A.6 Analisis Deskriptif Wajib Pajak Pindah

Wajib Pajak Pindah adalah berubahnya alamat Wajib pajak yang mengakibatkan berpindah tempat Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan yang dimaksud di sini adalah kewajiban pembayaran utang pajaknya. Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa pada tahun 2005 terdapat empat KPP yang memiliki Wajib Pajak pindah sebesar nol rupiah, yaitu: KPP Jakarta Palmerah, KPP Jakarta Tamansari Dua, KPP Jakarta Tambora dan KPP Jakarta Cengkareng. KPP Jakarta Kebon Jeruk memiliki Wajib Pajak pindah tertinggi sebesar Rp 3,205 milyar. Pada tahun 2006 terdapat empat KPP yang memiliki Wajib Pajak pindah sebesar nol rupiah, yaitu: KPP Jakarta Grogol Petamburan, KPP Jakarta Tamansari Satu, KPP Jakarta Tamansari Dua dan KPP Jakarta Cengkareng. KPP Jakarta Tambora memiliki Wajib Pajak pindah tertinggi sebesar Rp 1,030 milyar. Pada tahun 2007 KPP Pratama Jakarta Kalideres, KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua, KPP Pratama Jakarta Kembangan dan KPP Madya Jakarta Barat memiliki Wajib Pajak pindah sebesar nol rupiah sedangkan Wajib Pajak tertinggi adalah KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu sebesar Rp 107,568 milyar.

Tabel 4.6 Wajib Pajak Pindah (dalam ribuan rupiah)

No.	KPP Jakarta	Tahun Pajak			
		2005	2006	2007	Total
1.	Palmerah	0	140.585	8.114.520	8.255.105
2.	Grogol Petamburan	109.899	0	5.082.204	5.192.103
3.	Tamansari Satu	36.307	0	1.324.988	1.361.295
4.	Tamansari Dua	0	0	12.914.188	12.914.188
5.	Tambora	0	1.030.613	5.903.465	6.934.078
6.	Cengkareng	0	0	39.030.291	39.030.291
7.	Kebon Jeruk	3.205.386	374.378	45.098.191	48.677.955
8.	Kalideres	-	-	-	0
9.	Kebon Jeruk Satu	-	-	107.568.519	107.568.519
10.	Kebon Jeruk Dua	-	-	-	0
11.	Kembangan	-	-	-	0
12.	Madya Jakarta Barat	-	-	-	0
	Total	3.351.592	1.545.576	225.036.366	

Sumber dari laporan bulanan KPL.KW.753 yang dibuat per tahun

Tabel 4.7 Juru Sita Pajak (jumlah petugas)

No.	KPP Jakarta	Tahun Pajak			
		2005	2006	2007	Total
1.	Palmerah	5	4	2	11
2.	Grogol Petamburan	3	4	3	10
3.	Tamansari Satu	2	3	3	8
4.	Tamansari Dua	2	4	4	10
5.	Tambora	7	4	4	15
6.	Cengkareng	1	3	3	7
7.	Kebon Jeruk	2	4	3	9
8.	Kalideres	-	-	0	0
9.	Kebon Jeruk Satu	-	-	2	2
10.	Kebon Jeruk Dua	-	-	2	2
11.	Kembangan	-	-	2	2
12.	Madya Jakarta Barat	-	-	1	3
	Total	22	26	29	

Sumber dari laporan per triwulan KPL.KPP.74 yang dibuat per tahun

A.7 Analisis Deskriptif Juru Sita Pajak (JSP)

Juru Sita Pajak adalah jumlah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa (SP), penyitaan dan penyanderaan. Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa pada tahun 2005 KPP Jakarta Cengkareng memiliki JSP terendah sebanyak satu orang sedangkan JSP terbanyak terdapat pada KPP Jakarta Cengkareng dengan JSP sebanyak tujuh orang. Pada tahun 2006 KPP Jakarta Tamansari

Satu dan KPP Jakarta Cengkareng memiliki JSP paling sedikit sebanyak tiga orang sedangkan JSP pada KPP Jakarta Palmerah, KPP Jakarta Grogol Petamburan, KPP Jakarta Tamansari Dua, KPP Jakarta Tambora dan KPP Jakarta Kebon Jeruk dengan JSP sebanyak empat orang. Pada tahun 2007 KPP Pratama Jakarta Kalideres tidak memiliki JSP sedangkan JSP terbanyak terdapat pada KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua dan KPP Pratama Jakarta Tambora sebanyak empat orang.

A.8 Analisis Deskriptif Surat Tegoran (ST)

Surat Tegoran adalah nilai utang pajak dari Wajib Pajak yang tertera pada surat tegoran. Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa pada tahun 2005 KPP Jakarta Cengkareng memiliki nilai ST terendah dengan nilai ST sebesar Rp 30,074 milyar sedangkan nilai ST tertinggi adalah KPP Jakarta Grogol Petamburan dengan nilai ST sebesar Rp 14,286 trilyun. Pada tahun 2006 KPP Jakarta Tamansari Satu memiliki nilai ST terendah dengan nilai ST sebesar Rp 26,015 milyar sedangkan nilai ST tertinggi adalah KPP Jakarta Tambora dengan nilai ST sebesar Rp 1,003 trilyun. Pada tahun 2007 terdapat tiga KPP yang tidak menerbitkan ST (nilai SP sebesar nol rupiah), yaitu: KPP Paratama Jakarta Kalideres, KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua dan KPP Pratama Jakarta Kembangan sedangkan nilai ST tertinggi adalah KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk dengan nilai ST sebesar Rp 131,564 milyar.

Tabel 4.8 tabel Nilai Surat Tegoran (dalam ribuan rupiah)

No.	KPP Jakarta	Tahun Pajak			
		2005	2006	2007	Total
1.	Palmerah	27.076.384	60.003.957	39.649.551	126.729.892
2.	Grogol Petamburan	14.286.996.970	42.332.437	18.277.910	14.347.607.317
3.	Tamansari Satu	175.160.720	109.058.239	58.053.591	342.272.550
4.	Tamansari Dua	34.390.375	26.015.233	18.182.328	78.587.936
5.	Tambora	45.831.993	1.003.455.208	67.926.660	1.117.213.861
6.	Cengkareng	30.074.765	42.701.563	74.027.218	146.803.546
7.	Kebon Jeruk	89.685.547	57.947.095	131.564.533	279.197.175
8.	Kalideres	-	-	0	0
9.	Kebon Jeruk Satu	-	-	51.968.709	51.968.709
10.	Kebon Jeruk Dua	-	-	0	0
11.	Kembangan	-	-	0	0
12.	Madya Jakarta Barat	-	-	13.285.182	13.285.182
	Total	14.689.216.754	1.341.513.732	472.935.682	

Sumber dari laporan per triwulan KPL.KPP.74 yang dibuat per tahun

A.9 Analisis Deskriptif Surat Paksa (SP)

Surat Paksa adalah nilai total utang pajak yang harus segera dilunasi Wajib Pajak berupa utang pajak dan biaya penagihannya yang dilaksanakan oleh JSP. Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa pada tahun 2005 KPP Jakarta Cengkareng memiliki nilai SP terendah dengan nilai SP sebesar Rp 15,773 milyar sedangkan nilai SP tertinggi adalah KPP Jakarta Grogol Petamburan dengan nilai SP sebesar Rp 4,782 trilyun. Pada tahun 2006 KPP Jakarta Tambora memiliki nilai SP terendah dengan nilai SP sebesar Rp 9,282 milyar sedangkan nilai SP tertinggi adalah KPP Jakarta Tamansari Satu dengan nilai SP sebesar Rp 71,612 milyar. Pada tahun 2007 terdapat tiga KPP yang tidak memberikan SP kepada Wajib Pajak (nilai SP sebesar nol rupiah), yaitu: KPP Pratama Jakarta Kalideres, KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua dan KPP Pratama Jakarta Kembangan sedangkan nilai SP tertinggi adalah KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk dengan nilai ketetapan pajak sebesar Rp 59,232 milyar.

Tabel 4.9 Surat Paksa Tahun (dalam ribuan rupiah)

No.	KPP Jakarta	Tahun Pajak			
		2005	2006	2007	Total
1.	Palmerah	22.848.412	71.496.782	24.583.321	118.928.515
2.	Grogol Petamburan	4.782.234.853	28.240.208	13.302.059	4.823.777.120
3.	Tamansari Satu	165.969.926	71.612.964	50.934.623	288.517.513
4.	Tamansari Dua	25.803.465	23.187.710	8.128.227	57.119.402
5.	Tambora	75.409.185	9.282.657	14.343.842	99.035.684
6.	Cengkareng	15.773.747	29.796.416	11.836.260	57.406.423
7.	Kebon Jeruk	78.237.593	43.481.560	59.232.752	180.951.905
8.	Kalideres	-	-	0	0
9.	Kebon Jeruk Satu	-	-	21.462.818	21.462.818
10.	Kebon Jeruk Dua	-	-	0	0
11.	Kembangan	-	-	0	0
12.	Madya Jakarta Barat	-	-	22.828.011	22.828.011
	Total	5.166.277.181	277.098.297	226.651.913	

Sumber dari laporan per triwulan KPL.KPP.74 yang dibuat per tahun

A.10 Analisis Deskriptif Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

SPMP adalah nilai total utang pajak dari Wajib pajak yang akan dilakukan penyitaan oleh JSP. Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa pada tahun 2005 KPP Jakarta Cengkareng memiliki nilai SPMP terendah dengan nilai SPMP sebesar Rp 4,191 milyar sedangkan nilai SPMP tertinggi adalah KPP Jakarta Grogol Petamburan dengan nilai ketetapan pajak sebesar Rp 2,080

trilyun. Pada tahun 2006 KPP Jakarta Tambora memiliki nilai SPMP terendah dengan nilai SPMP sebesar Rp 4,932 milyar sedangkan nilai SPMP tertinggi adalah KPP Jakarta Tamansari Satu dengan nilai SPMP sebesar Rp 89,329 milyar. Pada tahun 2007 terdapat empat KPP yang tidak melaksanakan SPMP (nilai SPMP sebesar nol rupiah), yaitu: KPP Pratama Jakarta Kalideres, KPP Paratama Jakarta Kebon Jeruk Dua, KPP Pratama Jakarta Kembangan dan KPP Madya Jakarta Barat sedangkan nilai SPMP tertinggi adalah KPP Pratama Jakarta Palmerah dengan nilai SPMP sebesar Rp 455,084 milyar.

Tabel 4.10 Surat Perintah melaksanakan Penyitaan (dalam ribuan rupiah)

No.	KPP Jakarta	Tahun Pajak			Total
		2005	2006	2007	
1.	Palmerah	14.151.802	12.210.203	455.084.283	481.446.288
2.	Grogol Petamburan	2.080.168.032	34.675.459	88.536.859	2.203.380.350
3.	Tamansari Satu	42.018.953	89.329.435	143.002.668	274.351.056
4.	Tamansari Dua	7.691.323	25.381.501	932.908	34.005.732
5.	Tambora	38.893.328	4.932.583	1.769.712	45.595.623
6.	Cengkareng	4.191.438	20.361.928	6.673.969	31.227.335
7.	Kebon Jeruk	8.788.785	42.146.619	14.457.343	65.392.747
8.	Kalideres	-	-	0	0
9.	Kebon Jeruk Satu	-	-	4.956.387	4.956.387
10.	Kebon Jeruk Dua	-	-	0	0
11.	Kembangan	-	-	0	0
12.	Madya Jakarta Barat	-	-	0	0
	Total	2.195.903.661	229.037.728	715.414.129	

Sumber dari laporan per triwulan KPL.KPP.74 yang dibuat per tahun

B. Analisis Statistik Inferensial

Statistik Inferensial (sering juga disebut statistik *induktif* atau statistik *probabilitas*), adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi.

Variabel dalam tesis ini terdiri dari:

- a. Variabel Dependen, yakni variabel tunggakan pajak (Y)
- b. Variabel Independen, terdiri dari 10 (sepuluh) variabel yaitu:
 1. Hasil pemeriksaan (X1)
 2. Nilai Surat Setoran Pajak/SSP (X2)

3. Nilai Pemindahbukuan/Pbk (X3)
4. Hasil SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding (X4)
5. Penghapusan Piutang Pajak (X5)
6. Wajib Pajak pindah (X6)
7. Juru Sita Pajak (X7)
8. Surat Tegoran/ST (X8)
9. Surat Paksa/SP (X9)
10. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/SPMP (X10)

Selanjutnya dilakukan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

1. Uji Multikolinier
2. Uji Autokorelasi
3. Uji R^2
4. Uji Signifikansi

B.1 Uji Multikolinier

Uji Multikolinier dimaksudkan untuk membuktikan atau menguji ada tidaknya hubungan yang linier antara variabel bebas (independen) satu dengan variabel bebas (independen) yang lainnya. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan apakah terjadi multikolinieritas ataukah tidak, dapat dilakukan dengan menggunakan koefisien signifikansi, pilih salah satu *two-tailed* atau *one-tailed*, dibandingkan dengan tingkat alpha yang ditetapkan sebelumnya (misalnya 5%). Apabila koefisien signifikansi lebih besar dari 5%, maka dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas di antara variabel independen.

Selanjutnya, dengan menggunakan SPSS-15 dapat diketahui signifikansi antara variabel bebas (independen) satu dengan variabel bebas (independen) yang lainnya. Signifikansi korelasi antara variabel bebas yang memiliki signifikansi di atas 5% adalah sebagai berikut:

Dari tabel 4.11.1 diketahui bahwa terdapat 7 (tujuh) variabel bebas yang memiliki signifikansi korelasi dengan variabel bebas lainnya dibawah 5% yaitu:

1. Nilai Surat Setoran Pajak (X2)

2. Nilai Pemindahbukuan (X3)
3. Penghapusan Piutang Pajak (X5)
4. Juru Sita (X7)
5. Nilai Surat Tegoran (X8)
6. Nilai Surat Paksa (X9)
7. Nilai Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (X10)

Tabel 4.11.1 Uji Multikolinier Awal

Variabel Bebas		Signifikansi Korelasi
X2	X3	0,000
X2	X7	0,006
X3	X2	0,000
X3	X7	0,021
X5	X7	0,049
X7	X2	0,006
X7	X3	0,021
X7	X5	0,049
X8	X9	0,000
X8	X10	0,000
X9	X8	0,000
X9	X10	0,000
X10	X8	0,000
X10	X9	0,000

Berarti kemungkinannya 7 (tujuh) independen variabel ini tidak bisa ikut dimasukkan dalam model persamaan regresi berganda. Oleh karena itu, kita perlu melakukan kembali uji coba (trial error) dengan menghilangkan salah satu independen variabel bebas tersebut. Misalnya independen variabel Nilai Surat Tegoran (X8) akan kita keluarkan dari kemudian kita lihat uji multikolinier dari sembilan variabel tersebut dan hasilnya dapat di lihat pada tabel 4.11.2. Selanjutnya kita keluarkan satu independen variabel yaitu Nilai Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (X10) dan kembali melakukan uji multikolinier dari delapan variabel bebas yang tersisa, dan hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.11.3. Kemudian kita keluarkan satu independen variabel yaitu Nilai Surat Setoran Pajak (X2) dan kembali melakukan uji multikolinier dari delapan variabel bebas yang tersisa, dan hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.11.3

Tabel 4.11.2 Uji Multikolinier (X8 dikeluarkan)

Variabel Bebas		Signifikansi Korelasi
X2	X3	0,000
X2	X7	0,006
X3	X2	0,000
X3	X7	0,021
X7	X2	0,006
X7	X3	0,021
X7	X5	0,049
X9	X10	0,000
X10	X9	0,000

Tabel 4.11.3 uji Multikolinier (x8, X10 dikeluarkan)

Variabel Bebas		Signifikansi Korelasi
X2	X3	0,000
X2	X7	0,006
X3	X2	0,000
X5	X7	0,049
X7	X2	0,006
X7	X5	0,049

Tabel 4.11.4 uji Multikolinier (X8, X10, X2 dikeluarkan)

Variabel Bebas		Signifikansi Korelasi
X3	X7	0,021
X5	X7	0,049
X7	X3	0,021
X7	X5	0,049

Pertimbangan berikutnya untuk memilih Independen variabel Nilai Pemindahbukuan (X3), Penghapusan Piutang Pajak (X5) atau Nilai Juru Sita (X7) yang dikeluarkan dan kembali melakukan uji multikolinier dan melihat hasil uji signifikansi dari model regresi berganda. Setelah dilakukan uji coba (trial and error), maka dipilih untuk mengeluarkan independen variabel Nilai Juru Sita (X7) karena hasil uji signifikansi t_0 memberikan hasil yang terbaik.

Hasil yang diperoleh dari uji multikolinier adalah empat variabel harus dikeluarkan dari formula/persamaan regresi linier berganda karena keempat independen variabel tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan independen variabel bebas lainnya yaitu signifikansi di atas 5%. Sehingga yang bersisa hanya 6 (enam) independen variabel yang layak untuk masuk dalam model

persamaan regresi linier berganda yaitu:

1. Hasil pemeriksaan (X1)
2. Nilai Pemindahbukuan (X3)
3. Hasil SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding (X4)
4. Penghapusan Piutang Pajak (X5)
5. Wajib Pajak pindah (X6)
6. Surat Paksa/SP (X9)

Tabel 4.12 uji Multikolinier (X8, X10, X2, X7 dikeluarkan)

Correlations							
		X1	X3	X4	X5	X6	X9
Sig. (1-tailed)	X1	.	0,429	0,248	0,391	0,210	0,324
	X3	0,429	.	0,316	0,412	0,436	0,439
	X4	0,248	0,316	.	0,411	0,338	0,467
	X5	0,391	0,412	0,411	.	0,409	0,436
	X6	0,210	0,436	0,338	0,409	.	0,418
	X9	0,324	0,439	0,467	0,436	0,418	.

Cara pegujian lain dengan menggunakan statistik adalah uji *collinearity statistics*. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat *multicollinearity* atau korelasi di antara variabel independen X1, X3, X4, X5, X6 dan X9. Uji *collinearity statistics* dilakukan dengan melihat hasil *tolerance* dan VIF (*variance inflation factor*). *Tolerance* berkisar antara 0-1, dengan 0= *high collinearity* dan 1= *low collinearity*. Sedangkan VIF berkisar antara 1-*infinity*, dengan 1=*low collinearity* (Stanislaus S Uyanto 2006, 224).

Hasil statistik dengan menggunakan SPSS-15, diperoleh bahwa *Tolerance* berkisar antara 0 sampai dengan 1 sedangkan VIF berkisar antara 1 sampai dengan *infinity*. Sehingga dapat diasumsikan tidak terjadi *multicollinearity* (atau tepatnya hanya *low collinearity*).

Berikut di bawah ini ditunjukkan hasil *collinearity statistics* yang diujikan pada lima model regresi linier berganda pada penelitian ini, yaitu model pertama data yang dipergunakan dari tahun 2005 s.d. Desember 2007, model ke dua data yang dipergunakan dari tahun 2005 s.d. Juni 2007, model yang ke tiga data yang dipergunakan tahun 2007, model yang ke empat data yang dipergunakan tahun 2006 dan model yang ke lima data yang dipergunakan tahun 2005

Tabel 4.13 Collinearity Statistics pada lima model

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics		Tahun
		Tolerance	VIF	
1	(Constant)			
	X1	0,984	1,017	
	X3	0,996	1,004	2005
	X4	0,990	1,010	s.d.
	X5	0,997	1,003	Des
	X6	0,989	1,011	2007
	X9	0,996	1,004	

Tabel 4.13 Collinearity Statistics pada lima model

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics		Tahun
		Tolerance	VIF	
2	(Constant)			
	X1	0,986	1,014	
	X3	0,982	1,018	2005
	X4	0,991	1,009	s.d.
	X5	0,995	1,005	Juni
	X6	0,978	1,022	2007
	X9	0,994	1,006	
3	(Constant)			
	X1	0,909	1,101	
	X3	0,971	1,029	
	X4	0,984	1,118	2007
	X9	0,728	1,373	
4	(Constant)			
	X1	0,864	1,158	
	X3	0,739	1,354	
	X4	0,849	1,177	2006
	X5	0,967	1,035	
	X9	0,946	1,057	
5	(Constant)			
	X1	0,982	1,018	
	X3	0,909	1,100	
	X4	0,846	1,183	2005
	X5	0,980	1,021	
	X9	0,984	1,016	

a. Dependent Variable: Y

B.2 Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi di antara data pengamatan atau tidak. Menurut R. Gunawan Sudarmanto (2005, 143) adanya autokorelasi dapat mengakibatkan pengamat mempunyai varians tidak minimum, dan uji-t tidak dapat digunakan karena akan memberikan kesimpulan yang salah. Ada tidaknya autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan uji *Durbin-Watson*.

Menurut Stanislaus S. Uyanto (2006, 218), Durbin-Watson digunakan untuk menguji apakah asumsi residuals atau error (ϵ_i) dari model regresi berganda $y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \dots + \beta_k X_{ki} + \epsilon_i$ bersifat independen atau tidak terjadi autokorelasi. Nilai uji statistik Durbin-Watson berkisar antara 0 dan 4. Sebagai pedoman umum, bila uji statistik Durbin-Watson lebih kecil dari satu atau lebih besar dari tiga, maka residuals atau error (ϵ_i) dari model regresi berganda tidak bersifat independen atau terjadi autocorrelation. Hasil statistik dengan menggunakan SPSS-15 dengan memasukkan enam independen variabel (yang telah ditentukan dalam uji multikolinier di atas) ke dalam persamaan regresi berganda akan diperoleh nilai uji statistik Durbin-Watson sebesar 2,037. Jadi dapat diasumsikan tidak terjadi autocorrelation.

Tabel 4.14 uji Statistik Durbin-Watson

Model	Durbin-Watson	Tahun
1	2,037	2005 s.d. Des 2007
2	2,031	2005 s.d. Juni 2007
3	2,221	2007
4	1,588	2006
5	2,194	2005

a. Predictors: (Constant), X9, X4, X1, X5, X6, X7

b. Dependent Variable: Y

B.3 Uji Signifikansi

Pengujian yang dilakukan dalam uji signifikansi adalah:

1. Uji F.

Statistik uji F yang dihitung dipergunakan sebagai dasar pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis varian. Analisis varians digunakan untuk menguji hipotesis bahwa seluruh independen variabel X1, X3, X4, X5, X6, dan X9 tidak mempengaruhi Y. Hipotesis yang diuji adalah:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = \beta_9 = 0$$

(tidak ada pengaruh dari independen variabel terhadap dependen variabel)

$$H_a : \beta_i \neq 0$$

(paling sedikit ada satu independen variabel yang mempengaruhi dependen variabel)

2. Uji R^2 (koefisien korelasi berganda/koefisien determinasi berganda)
Koefisien R^2 digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi variasi X_i terhadap variasi Y .
3. Uji t_0
4. Persamaan Model regresi berganda

Tabel 4.15 Uji F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	Tahun
1	Regression	7,6E+016	6	1,239E+016	278,039	,000 ^a	2005 s.d. Des 2007
	Residual	3,8E+015	83	4,560E+013			
	Total	8,0E+016	89				
2	Regression	5,6E+016	6	9,308E+015	167,386	,000 ^a	2005 s.d. Juni 2007
	Residual	3,6E+015	64	5,561E+013			
	Total	5,9E+016	70				
3	Regression	2,4E+016	5	4,778E+015	495,153	,000 ^a	2007
	Residual	2,7E+014	28	9,650E+012			
	Total	2,4E+016	33				
4	Regression	2,5E+016	6	4,235E+015	614,360	,000 ^a	2006
	Residual	1,4E+014	21	6,983E+012			
	Total	2,6E+016	27				
5	Regression	2,5E+016	6	4,181E+015	31,789	,000 ^a	2005
	Residual	2,8E+015	21	1,315E+014			
	Total	2,8E+016	27				

A Predictors: (Constant), X8, X4, X5, X1, X6, X3

B Dependent Variable: Y

Berikut akan diuraikan mengenai uji F, uji R^2 , uji t_0 dan persamaan model regresi berganda.

B.3.1 Uji F

Hasil statistik uji F dengan menggunakan SPSS-15 pada lima model (untuk tahun 2005 s.d. Desember 2007, 2005 s.d. Juni 2007, 2007, 2006, 2005) dapat diketahui dengan melihat nilai F dan signifikansinya pada tabel 4.15.

Signifikansi dari nilai F adalah sebesar 0,000 pada lima model (untuk tahun 2005 s.d. Desember 2007, 2005 s.d. Juni 2007, 2006, 2005), sehingga berdasarkan uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh minimal satu independen variabel yang mempengaruhi dependen variabel (H_a ditolak). Hal ini ditandai dengan signifikansi F sebesar 0,000.

B.3.2 Uji R^2

Pengujian R^2 dengan menggunakan SPSS-15 pada lima model (untuk tahun 2005, 2006, 2007, 2005 s.d. juni 2007 dan 2005 s.d. Desember 2007) dapat diketahui dengan melihat tabel 4.16. Signifikansi dari nilai R^2 pada lima model tersebut diatas 95%, sehingga disimpulkan bahwa persamaan model regresi berganda tersebut layak digunakan dengan keyakinan di atas 90% untuk dapat menjelaskan bahwa dependen variabel dipengaruhi oleh independen variabel.

Tabel 4.16 Uji R^2

Model Summary^b

Model	R	R^2	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Tahun
1	0,976 ^a	0,953	0,949	6752724,669	2005 s.d. Des 2007
2	0,970 ^a	0,940	0,934	7456999,723	2005 s.d. Juni 2007
3	0,994 ^a	0,989	0,987	3106515,924	2007
4	0,997 ^a	0,994	0,993	2625510,607	2006
5	0,949 ^a	0,901	0,872	11468008,30	2005

a Predictors: (Constant), X9, X4, X1, X5, X6, X7

b Dependent Variable: Y

B.3.3 Uji t_0

Hasil dari uji t_0 dengan menggunakan model regresi linier berganda yang dapat diambil pada lima model (untuk tahun 2005, 2006, 2007, 2005 s.d. juni 2007 dan 2005 s.d. Desember 2007) di atas diketahui bahwa:

- a. Pada penelitian ke lima model di atas dapat diketahui bahwa independen variabel yang berpengaruh secara signifikan 5% terhadap dependen variabel adalah Hasil pemeriksaan (X1) dan Hasil SK Pembetulan/SK

- Keberatan/Putusan Banding (X4) yang memberikan pengaruh signifikan terhadap tunggakan pajak.
- Tiga model pertama yang signifikansi 5% terhadap dependen variabel, terjadi pada empat independen variabel yang sama, yaitu: Pemeriksaan (X1), Pemindahbukuan (X3), Hasil SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding (X4), Wajib Pajak Pindah (X6)
 - Jika dibandingkan signifikansi antara model satu (untuk tahun 2005 s.d. Desember 2007) dengan model dua (untuk tahun 2005 s.d. Juni 2007), yaitu saat pemberlakuan KPP modern serentak), maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa untuk kedua model terdapat empat independen variabel yang mempengaruhi dependen variabel (memiliki signifikansi 5%) yaitu: Pemeriksaan (X1), Pemindahbukuan (X3), Hasil SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding (X4), Wajib Pajak Pindah (X6). Pada penelitian uji signifikansi t_0 menunjukkan peningkatan pengaruh Penghapusan Piutang Pajak (X5) dan Surat Paksa (X9). Penghapusan Piutang Pajak (X5) meningkat pengaruhnya dari $t_0 = 0,321$ sebelum pelaksanaan kantor pajak modern (untuk tahun 2005 s.d. Juni 2007) menjadi $t_0 = 0,273$ setelah pelaksanaan KPP modern (untuk tahun 2005 s.d. Des 2007). Demikian juga Surat Paksa (X9) meningkat pengaruhnya dari $t_0 = 0,929$ sebelum pelaksanaan kantor pajak modern (untuk tahun 2005 s.d. Juni 2007) menjadi $t_0 = 0,917$ setelah pelaksanaan KPP modern (untuk tahun 2005 s.d. Des 2007).
 - Pada tahun 2005 s.d. Desember 2007 kejadiannya sama dengan tahun tahun 2005 s.d. Juni 2007, yaitu dua independen variabel yang tidak signifikan 5% terhadap dependen variabel yaitu Penghapusan Piutang Pajak (X5) dan Surat Paksa (X9), sedangkan yang lainnya signifikan 5%.
 - Pada tahun 2005 s.d. Juni 2007 terdapat dua independen variabel yang tidak signifikan 5% terhadap dependen variabel yaitu Penghapusan Piutang Pajak (X5) dan Surat Paksa (X9), sedangkan yang lainnya signifikan 5%.

Tabel 4.17 Uji t_0

Coefficients(a)				
	Unstandardized	Standardize		

Model	Coefficients		d	t	Sig.	Tahun
	B	Std. Error	Coefficients Beta			
1 (Constant)	-3237035	1007538,8		-3,213	0,002	2005 s.d. Des 2007
X1	1,015	0,040	0,619	25,673	0,000 *)	
X3	-1,470	0,223	-0,158	-6,582	0,000 *)	
X4	-1,016	0,039	-0,631	-26,290	0,000 *)	
X5	-2,764	2,504	-0,026	-1,104	0,273	
X6	-0,981	0,057	0,413	-17,198	0,000 *)	
X9	0,000	0,002	0,003	0,105	0,917	
2 (Constant)	-3354001	1281476,3		-2,617	0,011	2005 s.d. Juni 2007
X1	1,006	0,050	0,626	20,322	0,000 *)	
X3	-1,275	0,273	-0,144	-4,673	0,000 *)	
X4	-1,017	0,043	-0,726	-23,613	0,000 *)	
X5	-2,772	2,773	-0,031	-1,000	0,321	
X6	-1,037	0,156	-0,205	-6,627	0,000 *)	
X9	0,000	0,002	0,009	0,089	0,929	
3 (Constant)	-353000,0	943289,52		-0,374	0,711	2007
X1	0,979	0,037	0,550	26,255	0,000 *)	
X3	-1,422	0,110	-0,262	-12,899	0,000 *)	
X4	-2,056	0,327	-0,133	-6,294	0,000 *)	
X6	-0,924	0,031	0,685	-30,247	0,000 *)	
X9	-0,326	0,095	-0,080	-3,431	0,000 *)	
4 (Constant)	-4145468	1284320,2		-3,228	0,004	2006
X1	0,921	0,067	0,244	13,801	0,000 *)	
X3	-0,546	0,367	-0,028	-1,488	0,152	
X4	-1,000	0,017	-1,027	-57,635	0,000 *)	
X5	-8,980	9,244	-0,016	-0,971	0,342	
X6	-0,997	2,819	-0,007	-0,354	0,727	
X9	-0,061	0,049	-0,021	-1,261	0,221	
5 (Constant)	786650,87	4135568,3		0,190	0,851	2005
X1	1,025	0,083	0,856	12,352	0,000 *)	
X3	-2,912	2,759	-0,076	-1,055	0,303	
X4	-1,131	0,241	-0,351	-4,693	0,000 *)	
X5	-3,650	4,363	-0,058	-0,837	0,412	
X6	-2,257	4,656	0,035	-0,485	0,633	
X9	0,000	0,003	-0,004	-0,057	0,955	

a. Dependent Variable: Y
*) signifikan 5%

- f. Pada tahun 2007 terdapat empat independen variabel signifikan 5% terhadap dependen variabel yaitu: asil Pemeriksaan (X1), Pemindahbukuan (X3), Hasil SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding (X4), Wajib Pajak Pindah (X6) dan Surat Paksa (X9).
- g. Pada tahun 2006 kejadiannya sama dengan tahun 2005, yaitu terdapat dua independen variabel yang signifikan 5% terhadap dependen variabel yaitu:

Hasil Pemeriksaan (X1) dan Hasil SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding (X4) serta terdapat empat independen variabel yang tidak signifikan yaitu: Pemindahbukuan (X3), Penghapusan Piutang Pajak (X5), Wajib Pajak Pindah (X6) dan Surat Paksa (X9).

- h. Tahun 2005 dan 2006 adalah tahun yang memiliki signifikansi dibawah 5% paling sedikit dibandingkan tahun lainnya pada penelitian ini. Penelitian pada tahun ini menunjukkan bahwa hanya Hasil pemeriksaan (X1) dan Hasil SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding (X4) yang memberikan pengaruh signifikan terhadap tunggakan pajak.
- i. Pada tahun 2005 terdapat dua independen variabel yang signifikan 5% terhadap dependen variabel yaitu: Hasil Pemeriksaan (X1) dan Hasil SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding (X4) serta terdapat empat independen variabel yang tidak signifikan yaitu: Pemindahbukuan (X3), Penghapusan Piutang Pajak (X4), Wajib Pajak Pindah (X6) dan Surat Paksa (X9)

B.3.4 Persamaan Model regresi berganda

Hasil statistik dengan menggunakan SPSS-15 pada 5 model (untuk tahun 2005, 2006, 2007, 2005 s.d. juni 2007 dan 2005 s.d. Desember 2007) dapat diketahui tiap-tiap model regresi berganda yaitu :

- a. untuk tahun 2005 s.d. Des 2007

$$Y = 1,015 X1 - 1,470 X3 - 1,016 X4 - 2,764 X5 - 0,981 X6 - 3237035$$

- b. untuk tahun 2005 s.d. Juni 2007

$$Y = 1,006 X1 - 1,275 X4 - 1,275 X3 - 1,017 X4 - 2,772 X5 - 1,037 X6 - 3354001$$

- c. untuk tahun 2007

$$Y = 0,979 X1 - 1,422 X3 - 2,056 X4 - 0,924 X6 - 0,326 X9 - 353000$$

- d. untuk tahun 2006

$$Y = 0,921 X1 - 0,546 X3 - X4 - 8,980 X5 - 0,997 X6 - 0,061 X9 - 4145468$$

- e. untuk tahun 2005

$$Y = 1,025 X1 - 2,912 X3 - 1,131 X4 - 3,650 X5 - 2,257 X6 + 786650,87$$

Jika independen variabel konstansta (X1, X3, X4, X5, X6 dan X9) bernilai positif ini berarti independen variabel mempunyai hubungan yang searah dengan

dependen variabel (Y). Bila terjadi sebaliknya, independen variabel konstansta (X1, X3, X4, X5, X6 dan X9) bernilai negatif, ini berarti independen variabel mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan dependen variabel (Y). Hubungan yang signifikan dan searah terjadi bila independen variabel konstansta (X1, X3, X4, X5, X6 dan X9) bernilai positif dan memiliki hubungan yang signifikan yang ditandai dengan t_0 memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 5% terhadap dependen variabel (Y). Bila terjadi sebaliknya, yaitu bila hubungan yang tidak signifikan dan searah terjadi bila independen variabel konstansta (X1, X3, X4, X5, X6 dan X9) bernilai negatif dan memiliki hubungan yang tidak signifikan yang ditandai dengan t_0 memiliki nilai signifikan lebih besar dari 5% terhadap dependen variabel (Y)

B.4 Pengujian Hipotesis

Sehubungan dengan penerapan Kantor Pajak Modern di wilayah DJP Jakarta Barat pada tanggal 26 Juni 2007, maka peneliti mencari perbedaan signifikansi dengan membagi pengujian hipotesis sebelum dan setelah pemberlakuan Kantor Pajak Modern tersebut.

Pengujian Hipotesis yang dilakukan untuk dua rentang waktu yaitu

1. Tahun 2005 s.d. Desember 2007
2. Tahun 2005 s.d. Juni 2007

Hipotesis Awal :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = \beta_9 = 0$$

(tidak ada pengaruh dari independen variabel terhadap dependen variabel)

Hipotesis Akhir :

$$H_a : \beta_i \neq 0$$

(paling sedikit ada satu independen variabel yang mempengaruhi dependen variabel)

1. Tahun 2005 s.d. Desember 2007

Hasil uji R^2 (tabel 4.16) menunjukkan bahwa R^2 0,953. Hal ini menunjukkan bahwa independen variabel mempengaruhi dependen variabel sebanyak 95,3 % atau dengan kata lain independen variabel dapat menjelaskan dependen variabel sebanyak 95,3%, sedangkan sisanya sebesar 4,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam model. Hal ini berarti hipotesis awal yang mengatakan tidak ada pengaruh dari independen variabel terhadap dependen variabel ditolak ($H_0 : \beta_1 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = \beta_9 = 0$ ditolak) dan hipotesis akhir yang mengatakan paling sedikit ada satu independen variabel yang mempengaruhi dependen variabel diterima ($H_a : \beta_i \neq 0$ diterima)

2. Tahun 2005 s.d. Juni 2007

Hasil uji R^2 (tabel 4.16) menunjukkan bahwa R^2 0,970. Hal ini menunjukkan bahwa independen variabel mempengaruhi dependen variabel sebanyak 97 % atau dengan kata lain independen variabel dapat menjelaskan dependen variabel sebanyak 97%, sedangkan sisanya sebesar 3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam model. Hal ini berarti hipotesis awal yang mengatakan tidak ada pengaruh dari independen variabel terhadap dependen variabel ditolak ($H_0 : \beta_1 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = \beta_9 = 0$ ditolak) dan hipotesis akhir yang mengatakan paling sedikit ada satu independen variabel yang mempengaruhi dependen variabel diterima ($H_a : \beta_i \neq 0$ diterima)

C. Analisis Efektivitas Administrasi Perpajakan terhadap Tunggalan Pajak

C.1. Rasio Pencairan Tunggalan Pajak dibandingkan dengan Target Pencairan

Tax performance index adalah rasio pencairan tunggalan pajak dibandingkan dengan target penerimaan pajak melalui pencairan tunggalan pajak per KPP. Berikut akan dibahas tax performance index pada KPP di wilayah DJP Jakarta Barat dari tahun 2005 s.d. Desember 2007.

Target pencairan tunggalan pajak pada tahun 2005 (tabel 4.18.1) dapat dicapai oleh tiga kantor pajak, yaitu: KPP Jakarta Palmerah, KPP Jakarta Cengkareng dan KPP Jakarta Kebon Jeruk. KPP Jakarta Tamansari Dua hanya mencapai 87% dari target yang ditetapkan. Tiga kantor lainnya bahkan tidak dapat mencapai 80% dari target yang ditetapkan yaitu KPP Jakarta Grogol

Petamburan, KPP Jakarta Tamansari Satu dan KPP Jakarta Tambora.

Tabel 4.18.1
Rasio Pencairan Tunggakan Pajak dibandingkan dengan Target Pencairan Tahun 2005

No.	Unit Kerja	Tahun 2005 (dalam ribuan)			
		Target Pencairan	Realisasi Pengurangan		(4+5)/3
			SSP	Pbk	
1	2	3	4	5	11
1	Palmerah *)	25.310.000	19.452.313	6.343.287	1,02
2	Grogol Petamburan	59.720.000	20.544.092	4.654.028	0,42
3	Tamansari Satu	36.680.000	22.595.496	3.303.400	0,71
4	Tamansari Dua	27.920.000	22.395.454	370.265	0,82
5	Tambora	23.790.000	11.230.291	5.633.770	0,71
6	Cengkareng *)	13.050.000	21.502.964	5.203.434	2,05
7	Kebon Jeruk *)	18.370.000	26.665.525	6.873.739	1,83
TOTAL		204.840.000	144.386.135	32.381.923	0,86

*) melebihi target

Tabel 4.18.2
Rasio Pencairan Tunggakan Pajak dibandingkan dengan Target Pencairan Tahun 2006

No.	Unit Kerja	Tahun Pajak 2006 (dalam ribuan)			
		Target Pencairan	Realisasi Pengurangan		(4+5)/3
			SSP	Pbk	
1	2	3	4	5	11
1	Palmerah *)	19.852.530	24.659.049	5.298.287	1,51
2	Grogol Petamburan	48.123.582	14.307.482	6.027.041	0,42
3	Tamansari Satu	65.550.273	16.251.238	10.823.949	0,41
4	Tamansari Dua *)	22.378.849	21.982.471	2.348.116	1,09
5	Tambora	26.254.570	9.457.524	10.753.366	0,77
6	Cengkareng *)	8.460.649	18.827.217	11.307.441	3,56
7	Kebon Jeruk *)	22.169.331	33.436.045	4.441.991	1,71
TOTAL		212.789.784	138.921.026	51.000.191	0,89

*) melebihi target

Pada Rasio Pencairan Tunggakan Pajak dibandingkan dengan Target Pencairan Tahun 2006 (tabel 4.18.2) terjadi peningkatan pencapaian target pencairan tunggakan pajak menjadi empat kantor, yaitu: KPP Jakarta Palmerah, KPP Jakarta Tamansari Dua, KPP Jakarta Cengkareng dan KPP Jakarta Kebon

Jeruk. Kantor pajak lainnya bahkan tidak dapat mencapai minimal 80% dari target yang ditetapkan pada tahun 2006 yaitu: KPP Jakarta Grogol Petamburan, KPP Jakarta tamansari Satu dan KPP Jakarta Tambora.

Tabel 4.18.3

Rasio Pencairan Tunggakan Pajak dibandingkan dengan Target Pencairan Tahun 2007

No.	Unit Kerja	Tahun Pajak 2007 (dalam ribuan)			(4+5)/3
		Target Pencairan	Realisasi Pengurangan		
			SSP	Pbk	
1	2	3	4	5	11
1	Palmerah	29.284.819	17.794.480	2.174.971	0,68
2	Grogol Petamburan	41.650.718	13.957.681	3.562.733	0,42
3	Tamansari Satu	29.931.402	15.364.503	500.212	0,53
4	Tamansari Dua	24.462.388	10.059.999	1.210.744	0,46
5	Tambora	34.322.778	9.612.182	4.153.377	0,40
6	Cengkareng	18.881.159	5.263.242	5.026.504	0,54
7	Kalideres	9.362.022	526.334	122.252	0,07
8	Kebon Jeruk Satu *)	39.107.394	32.985.702	8.780.565	1,07
9	Kebon Jeruk Dua *)	969.484	1.390.956	-	1,43
10	Kembangan	1.088.903	28.458	270.306	0,27
11	Madya Jakarta Barat *)	40.384.493	42.052.070	44.056.286	2,13
TOTAL		269.445.560	149.035.607	69.857.950	0,81

*) melebihi target

Pada tahun 2007 (tabel 4.18.3) setelah penerapan kantor pajak modern, terdapat tiga kantor pajak yang dapat mencapai target yang ditetapkan, yaitu: KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu, KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua dan KPP Madya Jakarta Barat. Kantor Pajak lainnya tidak dapat mencapai target karena potensi pajak mereka yang sebagian besar berasal dari Wajib Pajak Besar ditarik ke KPP Madya Jakarta Barat.

Setelah melihat pencapaian target diatas, dapat diketahui hanya KPP Jakarta Kebon Jeruk yang konsisten dalam pencapaian target pencairan tunggakan pajak. Bahkan, setelah pemberlakuan penerapan KPP modern dengan dipecah menjadi KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk satu dan KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua target pencairan tunggakan pajak tetap dapat dicapai.

C.2. Rasio Pencairan Tunggakan Pajak dibandingkan dengan Penerimaan Pajak di KPP

Cara lain untuk melihat efektivitas adalah membandingkan antara pertumbuhan pencairan tunggakan pajak dibandingkan dengan penerimaan kantor pajak. Setelah mendapatkan prosentase pertumbuhannya dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan yang lebih besar untuk tiap kantor antara pertumbuhan pencairan tunggakan pajak dan pertumbuhan penerimaan kantor pajak dapat dikatakan lebih efektif.

Tabel 4.19.1
Rasio Pencairan Tunggakan Pajak dibandingkan dengan Penerimaan Pajak di KPP

Tahun	KPP	Pencairan Tunggakan	% Growth	Penerimaan KPP**)	% Growth
2005	Palmerah *)	25.795.600		453.814.516	
2006		29.957.336	16%	607.041.219	34%
2005	Grogol Petamburan	25.198.120		1.246.186.549	
2006		20.334.523	-19%	881.111.959	-29%
2005	Tamansari Satu *)	25.898.896		642.622.294	
2006		27.075.187	5%	550.745.967	-14%
2005	Tamansari Dua *)	22.765.719		819.375.180	
2006		24.330.587	7%	379.553.652	-54%
2005	Tambora *)	16.864.061		380.221.790	
2006		20.210.890	20%	557.518.945	47%
2005	Cengkareng *)	26.706.398		616.109.006	
2006		30.179.658	13%	757.955.280	23%
2005	Kebon Jeruk *)	33.539.264		591.332.535	
2006		37.878.036	13%	1.464.789.044	148%

*) mengalami pertumbuhan

***) dalam ribuan rupiah

Pada tabel 4.19.1 dapat diketahui bahwa enam KPP mengalami pertumbuhan dalam pencairan tunggakan pajak, yaitu: KPP Jakarta Palmerah, KPP Jakarta Tamansari Satu, KPP Jakarta Tamansari Dua, KPP Jakarta Tambora, KPP Jakarta Cengkareng dan KPP Jakarta Kebon Jeruk. Hanya satu buah kantor yang tidak mengalami pertumbuhan dalam pencairan tunggakan pajak yaitu KPP Jakarta Grogol Petamburan. Jika di lihat secara keseluruhan per tahun (tabel 4.19.2), maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan pencairan pajak

bertumbuh sebesar 7 persen dan sebaiknya lebih dipikirkan lebih lanjut untuk mengembangkan potensi yang ada dalam usaha untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak.

Tabel 4.19.2
Rasio Pencairan Tunggakan Pajak dibandingkan dengan Penerimaan Pajak di Kanwil

Ttahun	Pencairan Tunggakan Pajak	% Growth	Penerimaan KPP *)	% Growth
2005	176.768.058		453.814.545	
2006	189.966.217	7%	607.041.218	34%

*) dalam ribuan rupiah

Secara keseluruhan dari tahun 2005 s.d. 2007 (tabel 4.18.1 s.d. tabel 4.18.3) diketahui bahwa rata-rata pencapaian target adalah sebesar 80%. Alasan yang dapat dipertimbangkan paling bertanggung jawab atas tidak tercapainya tunggakan pajak adalah ketetapan pajak yang dihasilkan oleh pemeriksa pajak yang tidak kompeten sehingga ketetapan pajak tersebut menjadi beban penagihan. Jika Wajib Pajak keberatan dan dimenangkan, maka potensi pencairan tunggakan pajak akan berkurang sehingga tidak mungkin dapat mencapai target. Selain itu jika Wajib Pajak yang dikenakan ketetapan tidak dapat/mampu membayar, maka ketetapan pajak tersebut menjadi tunggakan (beban penagihan) yang tidak dapat dicairkan.

D. Analisis Efisiensi Administrasi Perpajakan Terhadap Tunggakan Pajak

Analisis efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak dilakukan dengan cara membandingkan antara biaya penagihan untuk melaksanakan pencairan tunggakan pajak dengan realisasinya. Jika prosentasi biaya penagihan dengan pencairan tunggakan pajak masih lebih kecil dari 1% maka dapat dikatakan efisien untuk administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak.

D.1. Rasio Biaya Penagihan Pajak dibandingkan dengan Pencairan Tunggakan Pajak di KPP

Pada tahun 2005 (tabel 4.20.1) prosentasi biaya penagihan dengan pencairan tunggakan pajak adalah 0,000930 (lebih kecil dari 1%) maka dapat dikatakan efisien untuk administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak. Efisiensi terendah sebesar 0,00078 dimiliki oleh KPP Jakarta Grogol Petamburan, sedangkan efisiensi tertinggi sebesar 0,00129 dimiliki oleh KPP Jakarta Palmerah. Pada tahun 2006 (tabel 4.20.2) prosentasi biaya penagihan dengan pencairan tunggakan pajak adalah 0,001208 (lebih kecil dari 1%) maka dapat dikatakan efisien untuk administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak. Efisiensi terendah sebesar 0,00070 dimiliki oleh KPP Jakarta Kebon Jeruk, sedangkan efisiensi tertinggi sebesar 0,00241 dimiliki oleh KPP Jakarta Palmerah.

Tabel 4.20.1
Rasio Biaya Penagihan Pajak dibandingkan dengan Pencairan Tunggakan Pajak di KPP tahun 2005

No.	Unit Kerja	SP lbr.	SPMP lbr.	Biaya Penagihan *)	Realisasi Pencairan *)	%
1	2	4	5	6	7	8
1	Palmerah	599	32	33.150	25.795.600	0,00129
2	Grogol Petamburan	373	11	19.750	25.198.120	0,00078
3	Tamansari Satu	368	33	21.700	25.898.896	0,00084
4	Tamansari Dua	216	26	13.400	22.765.719	0,00059
5	Tambora	376	5	19.300	16.864.061	0,00114
6	Cengkareng	368	64	24.800	26.706.398	0,00093
7	Kebon Jeruk	589	29	32.350	33.539.264	0,00096
		2.889	200	164.450	176.768.058	0,00093

*) dalam ribuan rupiah

Pada tahun 2007 (tabel 4.20.3) prosentasi biaya penagihan dengan pencairan tunggakan pajak adalah 0,000930 (lebih kecil dari 1%) maka dapat dikatakan efisien untuk administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak. Jika dilihat secara keseluruhan dari tahun 2005 s.d. 2007 (tabel 4.20.4) prosentasi biaya penagihan dengan pencairan tunggakan pajak adalah 0,001261 (lebih kecil dari 1%) maka dapat dikatakan efisien untuk administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak

Tabel 4.20.2
Rasio Biaya Penagihan Pajak dibandingkan dengan Pencairan Tunggakan Pajak di KPP tahun 2006

No.	Unit Kerja	SP lbr.	SPMP lbr.	Biaya Penagihan *)	Realisasi Pencairan *)	%
1	2	4	5	6	7	8
1	Palmerah	1.365	38	72.050	29.957.336	0,00241
2	Grogol Petamburan	651	20	34.550	20.334.523	0,00170
3	Tamansari Satu	206	31	13.400	27.075.187	0,00049
4	Tamansari Dua	497	16	26.450	24.330.587	0,00109
5	Tambora	335	15	18.250	20.210.890	0,00090
6	Cengkareng	617	73	38.150	30.179.658	0,00126
7	Kebon Jeruk	446	43	26.600	37.878.036	0,00070
		4.117	236	229.450	189.966.217	0,00121

*) dalam ribuan rupiah

Tabel 4.20.3
Rasio Biaya Penagihan Pajak dibandingkan dengan Pencairan Tunggakan Pajak di KPP tahun 2007

No.	Unit Kerja	SP lbr.	SPMP lbr.	Biaya Penagihan *)	Realisasi Pencairan *)	%
1	2	4	5	6	7	8
2	Palmerah	228	47	16.100	4.934.690	0,003263
3	Grogol Petamburan	686	48	39.100	5.077.080	0,007701
4	Tamansari Satu	239	37	15.650	7.408.539	0,002112
5	Tamansari Dua	164	1	8.300	881.720	0,009413
6	Tambora	253	2	12.850	1.587.763	0,008093
7	Cengkareng	209	34	13.850	447.875	0,030924
8	Kalideres	0	0	0	648.586	0
9	Kebon Jeruk	214	2	10.900	979.734	0,011125
10	Kebon Jeruk I	0	0	0	1.390.956	0
11	Kebon Jeruk II	0	0	0	469.657	0
12	Madya Jkt barat	34	0	1.700	17.447.647	0,000000
		2027	171	118.450	41.274.247	0,002878
	Total	6.047	429	345.250	219.583.444	0,001572

*) dalam ribuan rupiah

Tabel 4.20.4
Rasio Biaya Penagihan Pajak dibandingkan dengan Pencairan Tunggakan Pajak di KPP tahun 2005 s.d. 2007

No.	Tahun	SP lbr.	SPMP lbr.	Biaya Penagihan *)	Realisasi Pencairan *)	%
1	2	4	5	6	7	8
1	2005	2.889	200	164.450	176.768.058	0,000930
2	2006	4.117	236	229.450	189.966.217	0,001208
3	2007	6.047	429	345.250	219.583.444	0,001572
	Total	13.053	865	739.150	586.317.719	0,001261

*) dalam ribuan rupiah

D.2. Rasio Pencairan Tunggakan Pajak dibandingkan dengan Juru Sita Pajak

Efisiensi kinerja Juru Sita dapat dilihat dari kontribusinya per petugas terhadap penerimaan pajak melalui pencairan tunggakan pajak. Jika prosentasi kontribusi pencairan tunggakan pajak positif per pegawai positif hal ini mengartikan bahwa efisiensi kinerja petugas pajak per KPP mengalami peningkatan, hal yang sama juga berlaku sebaliknya.

Pada tabel 4.21 diketahui bahwa kinerja petugas Juru Sita Pajak tidak mengalami pertumbuhan, hal yang terjadi adalah sebaliknya yaitu perlambatan. Hasil dari kinerja dari Juru Sita Pajak ini tampaknya sejalan dengan model analisis regresi berganda yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu independen variabel Juru Sita Pajak (X7) tidak masuk dalam model, sehingga merupakan faktor-faktor lain (di luar $R^2 = 0,953$) yang mempengaruhi independen variabel (Y). Alasan lain yang mungkin masuk akal adalah jika dikaitkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menagih tunggakan pajak yang masih kecil, yaitu di bawah satu persen dari realisasi pencairan tunggakan pajak karena tidak mungkin mengharapkan pencairan tunggakan pajak yang besar jika biaya untuk menagihnya kecil. Cara lain adalah menambah jumlah Juru Sita Pajak dan meningkatkan ketrampilannya dalam melaksanakan tugasnya serta membangun kerja sama yang lebih erat dengan pihak-pihak eksternal terkait lainnya seperti kelurahan, kepolisian imigrasi dan pihak lainnya.

Tabel 4.21
Rasio Pencairan Tunggakan Pajak dibandingkan dengan Juru Sita Pajak per tahun

Tahun/Triwulan	Jumlah Rata-rata Juru Sita	Pencairan Tunggakan Pajak (dalam ribuan)	%Growth	Kontribusi per petugas	%Growth
2005	71,5	90.433.132		3.652.806	
2006	84,75	75.204.858	-17%	2.785.363	-24%
2007	83,75	89.844.873	19%	1.072.775	-61%

Secara keseluruhan dari tahun 2005 s.d. 2007 (Tabel 4.20. 4) diketahui bahwa rata-rata biaya 0,1261% dari pencairan tunggakan pajak. Hal ini berarti efisiensi yang terjadi adalah 0,1261% dan masih dibawah 1%, dapat dikatakan efisien.

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas dan Efisiensi Administrasi Perpajakan terhadap tunggakan Pajak

Berikut di bawah ini akan dibahas mengenai faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas dan Efisiensi Administrasi Perpajakan terhadap tunggakan Pajak, yaitu: hasil pemeriksaan, nilai pemindahbukuan, hasil SK Pembetulan/ SK Keberatan/ Putusan Banding, penghapusan piutang pajak, Wajib Pajak Pindah, dan surat Paksa.

E.1. Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan merupakan komponen yang mempengaruhi secara positif terhadap tunggakan pajak. Semakin besar ketetapan pajak yang dihasilkan oleh petugas pemeriksa pajak, maka akan mempengaruhi secara tidak langsung realisasi pencairan tunggakan pajak. Ketetapan pajak hasil pemeriksaan sebaiknya disetujui oleh Wajib Pajak sepenuhnya, sehingga dengan senang hati/kesadaran sendiri Wajib Pajak membayar ketetapan pajak tersebut. Seandainya ketetapan pajak tersebut tidak disetujui atau hanya disetujui sebagian, maka ketetapan pajak yang belum dibayar tersebut menjadi beban seksi penagihan KPP. Seksi penagihan KPP harus melaksanakan tindakan penagihan dari pemberitahuan surat tegoran, pemberitahuan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan bahkan tindakan lelang barang Wajib Pajak.

Tingkat efektifitas administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak akan semakin tinggi jika ketetapan hasil pemeriksaan yang belum dibayar Wajib Pajak segera dilunasi oleh Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena pelunasan hasil ketetapan pajak yang tertunggak merupakan faktor yang mempengaruhi secara positif terhadap efektifitas administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak. Efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak juga turut dipengaruhi oleh pembayaran ketetapan pajak yang tertunggak (hasil pemeriksaan) oleh Wajib Pajak. Hasil pemeriksaan pajak tersebut berpengaruh tidak langsung secara negatif terhadap tingkat efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak. Ukuran efisiensinya adalah biaya penagihan dibandingkan dengan realisasi pencairan tunggakan pajak. Semakin banyak ketetapan pajak (hasil pemeriksaan) yang dicairkan, maka akan semakin kecil tingkat efisiensinya.

E.2. Nilai Pemindahbukuan (Pbk)

Nilai Pbk merupakan komponen yang mempengaruhi secara positif terhadap tunggakan pajak. Semakin besar nilai Pbk yang dilakukan dengan cara mengurangi utang pajak Wajib Pajak terhadap ketetapan lebih bayarnya, maka pembayaran melalui Pbk tersebut termasuk dalam realisasi pencairan tunggakan pajak. Jumlah realisasi pencairan tunggakan pajak akan meningkat seiring bertambahnya Pbk atas utang pajak Wajib Pajak.

Nilai Pbk merupakan faktor yang mempengaruhi secara positif terhadap efektifitas administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak. Oleh karena itu, tingkat efektifitas administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak akan semakin tinggi jika ketetapan hasil pemeriksaan yang belum dibayar Wajib Pajak segera dilunasi oleh Wajib Pajak melalui Pbk. Efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak juga turut dipengaruhi oleh nilai Pbk. Nilai Pbk mempengaruhi tidak langsung secara negatif terhadap tingkat efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak karena ukuran efisiensinya adalah biaya penagihan dibandingkan dengan realisasi pencairan tunggakan pajak. Semakin banyak nilai Pbk yang dilakukan terhadap utang pajak Wajib Pajak, maka akan semakin kecil tingkat efisiensinya.

E.3. Hasil SK Pembetulan/ SK Keberatan/ Putusan Banding

Hasil SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding merupakan komponen yang dapat mempengaruhi secara positif dan negatif terhadap tunggakan pajak. Jika hasil SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding menambah ketetapan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, maka hasil SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding tersebut merupakan komponen yang mempengaruhi secara positif terhadap tunggakan pajak. Sebaliknya, jika hasil SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding mengurangi ketetapan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, maka hasil SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding tersebut merupakan komponen yang mempengaruhi secara negatif terhadap tunggakan pajak. Semakin besar hasil SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding yang menambah ketetapan pajak yang harus dibayar oleh Wajib pajak, maka hasil SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding tersebut akan menambah jumlah realisasi pencairan tunggakan

pajak. Hal yang sama berlaku pula sebaliknya.

Hasil SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding merupakan faktor yang dapat mempengaruhi secara positif dan negatif terhadap efektifitas administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak. Tingkat efektifitas administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak akan semakin tinggi jika hasil SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding menambah jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Hal yang sama berlaku pula sebaliknya. Efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak juga turut dipengaruhi oleh hasil SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding. Hasil SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding dapat mempengaruhi secara positif atau negatif terhadap tingkat efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak. Semakin banyak hasil SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding yang menambah jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, maka akan semakin kecil tingkat efisiensinya. Hal sama berlaku pula sebaliknya.

E.4. Penghapusan Piutang Pajak

Penghapusan piutang pajak merupakan komponen yang mempengaruhi secara negatif terhadap tunggakan pajak. Penghapusan piutang pajak adalah pengurangan pajak terutang Wajib Pajak yang dianggap nyata-nyata tidak dapat ditagih. Semakin besar nilai penghapusan piutang pajak yang dilakukan oleh KPP, maka akan semakin kecil jumlah realisasi pencairan tunggakan pajak yang dapat dicapai oleh KPP.

Penghapusan piutang pajak merupakan faktor yang mempengaruhi secara negatif terhadap efektifitas administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak. Tingkat efektifitas administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak akan semakin rendah karena penghapusan piutang pajak memperkecil jumlah realisasi pencairan tunggakan pajak yang dapat dicapai oleh KPP. Efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak juga turut dipengaruhi oleh penghapusan piutang pajak. Penghapusan piutang pajak mempengaruhi tidak langsung secara positif terhadap tingkat efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak. Semakin banyak penghapusan piutang pajak dilakukan, maka akan semakin besar tingkat efisiensinya.

E.5. Wajib Pajak Pindah

Wajib Pajak pindah merupakan komponen yang dapat mempengaruhi

secara positif dan negatif terhadap tunggakan pajak. Wajib Pajak pindah terjadi karena berubahnya alamat Wajib pajak yang mengakibatkan berpindah tempat Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan yang dimaksud di sini adalah kewajiban pembayaran utang pajaknya. Jika Wajib Pajak pindah ke KPP lain, maka Wajib Pajak pindah tersebut merupakan komponen yang mempengaruhi secara negatif terhadap tunggakan pajak. Sebaliknya, jika Wajib Pajak pindah yang masuk dari KPP lain, maka Wajib Pajak pindah tersebut merupakan komponen yang mempengaruhi secara positif terhadap tunggakan pajak. Semakin banyak Wajib Pajak pindah ke KPP lain, maka Wajib Pajak yang pindah ke KPP lain tersebut akan mengurangi jumlah realisasi pencairan tunggakan pajak. Hal yang sama berlaku pula sebaliknya.

Wajib Pajak pindah merupakan faktor yang dapat mempengaruhi secara positif dan negatif terhadap efektifitas administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak. Tingkat efektifitas administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak akan semakin rendah jika Wajib Pajak yang pindah tersebut membawa serta utang pajaknya ke KPP lain, sehingga kemungkinan realisasi pencairan tunggakan pajak berkurang di KPP yang lama. Hal yang sama berlaku pula sebaliknya. Efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak juga turut dipengaruhi oleh Wajib Pajak pindah. Wajib Pajak pindah dapat mempengaruhi secara positif atau negatif terhadap tingkat efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak. Semakin banyak Wajib Pajak pindah ke KPP lain dengan membawa serta utang pajaknya, maka akan besar tingkat efisiensinya. Hal sama berlaku pula sebaliknya seandainya KPP menerima Wajib Pajak pindahan dari KPP lain dengan membawa tunggakan pajaknya.

E.6. Surat Paksa (SP)

SP adalah nilai total utang pajak yang harus segera dilunasi Wajib Pajak berupa utang pajak dan biaya penagihannya yang dilaksanakan oleh JSP. Surat Paksa merupakan komponen yang mempengaruhi secara positif terhadap tunggakan pajak karena SP merupakan surat peringatan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya sebelum dilakukan tindakan penyitaan barang Wajib Pajak. Semakin besar nilai SP, maka jumlah realisasi pencairan tunggakan pajak akan meningkat.

Nilai SP merupakan faktor yang memengaruhi secara positif terhadap

efektifitas administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak. Oleh karena itu, tingkat efektifitas administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak akan semakin tinggi jika utang pajak yang tertera pada SP segera dilunasi oleh Wajib Pajak. Efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak juga turut dipengaruhi oleh nilai SP. Nilai SP mempengaruhi tidak langsung secara negatif terhadap tingkat efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak karena semakin banyak nilai SP atas utang pajak yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak, maka akan semakin kecil tingkat efisiensinya.

F. Kebijakan Perpajakan dikaitkan dengan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas dan Efisiensi Administrasi Perpajakan terhadap tunggakan Pajak

Hasil uji t_0 pada model regresi berganda (Tabel 4.17) menunjukkan bahwa Independen Variabel Hasil Pemeriksaan (X1) dan Hasil SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding (X4) signifikan terhadap tunggakan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa banyak ketetapan pajak yang dihasilkan oleh pemeriksa pajak diajukan pembetulan/keberatan/banding dan disetujui. Semakin banyak ketetapan yang diajukan pembetulan/keberatan/banding oleh Wajib pajak dan disetujui, maka potensi penerimaan pajak dari pencairan tunggakan pajak akan semakin kecil.

Kebijakan perpajakan khususnya pemeriksaan harus lebih menekankan pembahasan akhir antara pemeriksa pajak dengan Wajib pajak (Pasal 22 Peraturan Menteri keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007 Tgl. 28/12/2007 tanggal 28 desember 2007). Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak (oleh pemeriksa pajak baik melalui kurir, faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya) dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir. Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (PHP) dan berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Atas tanggapan Wajib Pajak, pemeriksa pajak kemudian membuat risalah pembahasan. Seandainya Wajib Pajak tidak hadir, maka risalah pembahasan dibuat ditambah dengan berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak.

Pertentangan antara Wajib pajak dan pemeriksa pajak harus dicari titik temunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak dibiarkan begitu saja dengan membiarkan Wajib Pajak mengajukan keberatan. Jika terjadi pertentangan, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar perbedaan tersebut dibahas dahulu oleh tim pembahas. Hasil pembahasan oleh Tim Pembahas dituangkan dalam risalah Tim Pembahas yang merupakan bagian dari Kertas Kerja Pemeriksaan.

Agar pembahasan akhir atas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dan pemeriksa pajak dapat dicapai titik temunya, kemampuan pemeriksa pajak harus ditingkatkan. Diklat teknis secara berkala harus dijadikan suatu kewajiban bagi pemeriksa pajak untuk naik ke jabatan fungsional berikutnya, sehingga kemampuan teknis pemeriksa pajak akan berkembang sesuai peraturan perpajakan yang ada.

Kebijakan perpajakan terhadap independen variabel Nilai Pemindahbukuan (X3) telah tepat dilaksanakan. Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan pengurangan hutang pajak terhadap ketetapan lebih bayarnya Wajib pajak. Hal ini akan mengurangi jumlah tunggakan pajak dan termasuk dalam jumlah pajak yang dicairkan.

Kebijakan perpajakan terhadap independen variabel Penghapusan Piutang Pajak (X5) berdasarkan hasil uji t_0 pada model regresi berganda (Tabel 4.17) menunjukkan hasil yang tidak signifikan dalam mempengaruhi tunggakan pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penghapusan piutang pajak memiliki pengaruh kecil terhadap tunggakan pajak dan jarang terjadi. Hal yang perlu diperhatikan dalam penghapusan tunggakan pajak adalah melakukan penghapusan atas tunggakan pajak secara selektif yaitu yang benar-benar tidak dapat ditagih.

Kebijakan perpajakan terhadap independen variabel Penghapusan Piutang Pajak (X5) berdasarkan hasil uji t_0 pada model regresi berganda (Tabel 4.17) menunjukkan hasil yang signifikan mempengaruhi tunggakan pajak. Kebijakan Wajib pajak pindah ini sudah tepat dalam mengurangi tunggakan pajak, karena hutang pajaknya Wajib Pajak akan turut pindah ke kantor pajak tempat Wajib Pajak berdomisili. Sebaiknya, dalam melakukan pemindahan administrasi Wajib pajak pindah ke kantor pajak lain, Wajib Pajak dibujuk secara persuasif untuk melunasi hutang pajaknya jika jumlahnya tidak besar. Pelunasan

hutang pajak tersebut akan dihitung dalam pencairan tunggakan pajak dan masuk dalam penerimaan kantor pajak.

Kebijakan perpajakan terhadap independen variabel Surat Paksa (X9) dapat dilihat dari tingkat efisiensinya. Pada Tabel 4.20.4 tingkat efisiensi dari tahun 2005 s.d. 2007 masih 0,1261% dan masih dibawah 1%. Hal ini berarti usaha untuk memaksa Wajib Pajak untuk melunasi hutang pajaknya dengan menerbitkan Surat Paksa masih dapat ditingkatkan dilihat dari prosentase biayanya yang masih kecil. Jumlah Juru Sita Pajak, ketrampilan teknis dalam penyitaan, kerjasama dengan pihak lain dalam melaksanakan penyitaan perlu ditingkatkan.

